

Abstrak

Potensi sumber daya pesisir dan perikanan budidaya di Indonesia perlu digali secara maksimal. Mengingat Indonesia mempunyai wilayah laut yang luas sehingga perlu dimanfaatkan secara baik. Oleh karena itu pemerintah melakukan sebuah terobosan terbaru dengan melakukan kebijakan pembangunan *shrimp estate* atau tambak udang berbasis kawasan. Tujuan penelitian yaitu menganalisis politik implementasi kebijakan pembangunan *shrimp estate* serta mengetahui berbagai aktor-aktor yang terlibat dalam pembangunan sehingga dalam pembangunan tersebut dapat sesuai dengan arah pembangunan keberlanjutan atau *sustainable development goals* (SDGs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder yang dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif terhadap kebijakan dan pembangunan *shrimp estate*. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terdapat beberapa temuan, adanya disinformasi yang disampaikan pemerintah kepada masyarakat sehingga muncul pemahaman yang berbeda terkait tanah untuk pembangunan tambak udang. Tidak adanya ganti rugi pada lahan yang terdampak menjadi persoalan. Selain itu, pengadaan lapangan kerja yang sedikit tidak sebanding dengan mega proyek nasional yang seharusnya membuka lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar. Belum tercapainya dalam aspek SDGS, persoalan tenaga kerja, lingkungan, dan kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah dalam menyelesaikan urusan tersebut.

Kata Kunci : *Politik Implementasi Kebijakan, Shrimp Estate, Sustainable Development Goals*

Abstract

The potential of coastal resources and aquaculture in Indonesia needs to be maximized. Given that Indonesia has a large marine area that needs to be utilized properly. Therefore, the government made a recent breakthrough by conducting a policy of shrimp estate development or area-based shrimp ponds. The purpose of the research is to analyze the politics of shrimp estate development policy implementation and to know the various actors involved in development so that development can be in accordance with the direction of sustainable development goals (SDGs). The method used in this research uses primary and secondary data analyzed with a qualitative descriptive approach to policy and shrimp estate development. Based on the results of the research conducted by the author, there are several findings, there is disinformation conveyed by the government to the community so that there is a different understanding of the land for the construction of shrimp ponds. The absence of compensation for the affected land is a problem. In addition, the small number of job opportunities is not comparable to the national mega project that is supposed to provide a large number of jobs. Not yet achieved in the aspect of SDGS, labor issues, the environment, and poverty are still a homework in solving these affairs.

Keywords: *Politics of Policy Implementation, Shrimp Estate, Sustainable Development Goals*